



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**UNIT KERJA** : DINAS KESEHATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AGUNAWAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **160026**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 783.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/108 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN Rp. 151.000.000
2. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 504 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. Tanah Seluas 1990 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
5. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN Rp. 62.000.000
6. Tanah Seluas 1680 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 220.000.000**

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, ZUZUKI KATANA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 77.550.000****D. SURAT BERTHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 32.050.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.112.600.000**



III. HUTANG

Rp. 70.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.042.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.